



Dana Bantuan Parpol Cair

YOGYAKARTA – Partai politik di Kota Yogyakarta yang memperoleh kursi di DPRD setempat bisa segera mencairkan bantuan politik yang disalurkan melalui Kantor Kesatuan Bangsa Pemerintah Kota Yogyakarta.

"Partai politik yang memperoleh bantuan adalah partai politik di DPRD Kota Yogyakarta periode 2009–2104 dan partai politik yang memperoleh kursi untuk periode 2014–2019," kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Pemerintah Kota Yogyakarta Sukanto, kemarin.

Jumlah partai politik yang memperoleh kursi untuk periode 2009–2014 tercatat sebanyak tujuh parpol yaitu PDIP, PAN, PPP, PKS, Golkar, Gerindra, dan Partai Demokrat dan untuk periode 2014–2019 ada tambahan satu partai politik yaitu Nasional Demokrat.

Parpol yang duduk pada periode lama akan memperoleh

bantuan untuk delapan bulan terhitung mulai Januari hingga Agustus 2014, sedangkan partai politik periode baru akan memperoleh bantuan selama empat bulan terhitung mulai September hingga Desember 2014. "Kami sudah menerima surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri mengenai aturan penyaluran bantuan politik. Pekan depan, akan disosialisasikan ke partai politik," katanya.

Sukanto menjelaskan, sudah ada beberapa partai politik periode lama yang mengajukan proposal pencairan bantuan. Namun, dengan adanya surat edaran tersebut, maka proposal harus dikembalikan untuk di-

perbaiki.

Syarat pengajuan bantuan politik adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pada tahun sebelumnya, serta rencana penggunaan dana yang akan diterima. "Dari laporan pertanggungjawab yang sudah diajukan partai, semuanya dinyatakan bisa diterima oleh BPK. Sehingga tinggal melakukan revisi sedikit saja," katanya.

Dana bantuan tersebut hanya dapat digunakan untuk kegiatan pembinaan politik dan pembiayaan administrasi organisasi. "Jika pada tahun lalu, pembinaan politik memperoleh porsi 40% dan administrasi 60%, pada tahun ini proporsinya dibalik," katanya.

Penghitungan bantuan yang diterimakan tidak mengalami perubahan yaitu tetap didasarkan pada suara yang diperoleh partai politik pada pemilu legislatif. Satu suara memperoleh bantuan Rp3.446. "Partai po-

litik periode lama didasarkan pada hasil pemilu legislatif 2009 sedangkan partai politik periode baru didasarkan pada hasil pemilu legislatif 2014," katanya.

Sukanto berharap, seluruh partai politik bisa segera menyerahkan proposal pencairan bantuan sehingga bantuan bisa langsung dicairkan pada pekan kedua September.

Dosen Hukum Tata Negara UGM Mahaarum Kusuma Peritiwi menilai, perubahan proporsional penggunaan dana bantuan partai politik menjadi lebih besar untuk pendidikan politik sudah benar. Hal tersebut menilik, partai politik memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. "Kalau perlu, seharusnya 100% untuk agenda pendidikan politik. Karena persoalan administrasi itu menjadi kewajiban partai politik sendiri," katanya.

● maha deva/ant

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kantor Kesatuan Bangsa	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005